

## **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH DI KOTA LHOKSEUMAWE**

**Idarwati dan Ratna**

Prodi Ekonomi Pembangunan  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Lhokseumawe

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kota Lhokseumawe. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dengan periode waktu 2005 s/d 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Regresi Linier Sederhana. Hasil yang diperoleh adalah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Belanja Daerah. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya menggunakan data yang lebih lengkap dan variabel yang lebih banyak lagi, supaya hasilnya lebih memuaskan.

**Kata Kunci** : "Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah"

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah yang mulai dilaksanakan secara efektif tanggal 1 januari 2001 (UU No.32/2004), merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintah yang sesungguhnya. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sejak tahun 2001 berimplikasi pada perubahan dalam sistem pembuatan keputusan terkait dengan pengalokasian sumber daya dalam anggaran pemerintah daerah.

Fenomena yang terdapat pada struktur APBD kabupaten/kota di Indonesia yaitu pada sisi pendapatan terdapat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap peranan pemerintah

pusat (Darwanto dan Yustikasari, 2007). Besarnya proposi tersebut memberikan satu petunjuk bahwa pembangunan perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh posisi anggaran pusat. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No 25 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka terjadi pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan Daerah.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh telah memberikan kewenangan yang lebih kepada Provinsi Aceh untuk mengelola keuangan daerah termasuk kebijakan investasi yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Sebagai konsekuensi di dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota dituntut untuk mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangannya. Hal ini menandakan bahwa daerah harus

berusaha untuk mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan tolak ukur bagi daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kota Lhokseumawe selama lima tahun terakhir yaitu periode 2008 sampai dengan 2012 dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah Kota Lhokseumawe**  
**Tahun Anggaran 2008 s/d 2012**

Tahun Anggaran	Belanja Daerah (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi
2008	420.781.746.731	20.604.686.381	4,20 %
2009	430.203.875.325	21.580.801.976	4,29 %
2010	401.714.388.013	19.414.688.503	4,01 %
2011	521.424.477.433	28.602.050.297	5,21 %
2012	572.642.520.110	28.230.886878	5,72 %
Rata-rata			4,68 %

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Lhokseumawe

Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa besarnya Pendapatan Asli Daerah Kota Lhokseumawe pada periode 2008-2012 naik dan turun dan

kontribusinya terhadap Belanja Daerah relatif kecil.

Dari fenomena di atas dalam kontes otonomi daerah, semestinya

kemampuan untuk menyelenggarakan otonomi tersebut ditunjukkan dengan peranan Pendapatan Asli Daerah yang signifikan di dalam membiayai Belanja Daerahnya yang tercermin pada kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah yang bersangkutan. Melihat kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kota Lhokseumawe, maka penulis tertarik untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kota Lhokseumawe.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pemerintah daerah harus dapat menjalankan rumah tangganya secara mandiri dan dalam upaya peningkatan kemandirian tersebut pemerintah dituntut untuk mampu meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika Pendapatan Asli Daerah meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan bertambah, sehingga mampu mendorong tingkat kemandirian daerah tersebut.

Menurut Mardiasmo (2002;132), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Halim (2007;96) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah berupa

pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa; "Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Dari definisi Pendapatan Asli Daerah yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas pada dasarnya memiliki karakteristik yang sama. Maka dari itu penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah adalah segala penerimaan daerah setempat yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

### **2. Pajak Daerah**

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan Undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-

undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas negara selalu berisi uang pajak. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan undang-undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak.

Menurut Mardiasmo (2009 ; 21), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan pajak daerah itu sendiri menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi diatas, penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerahnya tanpa imbalan yang langsung dapat dirasakan, yang bersifat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah setempat.

## C. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan (Sugiono, 2009:8).

Untuk menganalisis pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) digunakan analisis regresi linear sederhana. Penggunaan analisis regresi linear sederhana dalam penelitian ini karena hanya terdapat satu variabel independen (X).

Analisis regresi ini digunakan untuk mengukur pengaruh antara satu variabel prediktor (variabel bebas) terhadap variabel terikat. Adapun persamaan regresi linear sederhana yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + bX$$

Dimana:

Y = Belanja Daerah

a = Nilai Intercept (konstanta)

b = Koefisien regresi

X = Pendapatan Asli Daerah

## D. Pembahasan

### 1. Belanja Daerah

Berikut disajikan data pertumbuhan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Lhokseumawe selama periode tahun 2005-2014.

**Tabel 4.3 Pertumbuhan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota  
Lhokseumawe  
Periode Tahun 2005-2014**

<b>Tahun</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>Perkembangan</b>
2005	200.565.954.895	0
2006	269.751.313.103	34,50
2007	376.412.634.126	39,54
2008	420.781.746.731	11,79
2009	430.203.875.325	2,24
2010	401.714.388.013	(6,62)
2011	521.424.477.433	29,80
2012	572.642.520.110	9,82
2013	632.996.881.573	10,54
2014	727.480.904.420	14,93
<b>Rata-Rata</b>		<b>48,70</b>

Sumber : DPKAD Kota Lhokseumawe, 2016

Pada Tabel 4.3 dapat dilihat Belanja Daerah Kota Lhokseumawe selama periode 2005-2014 rata-rata mengalami penurunan sebesar -13,07% pada tahun 2006. Dan pada tahun 2007 mengalami peningkatan sebesar 378,90% rata-rata perkembangan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Lhokseumawe selama periode 2005-2014 sebesar 48,70% setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Lhokseumawe cenderung mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahun.

## **2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah**

Selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah penelitian, pada bagian ini akan diuji Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Peningkatan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Lhokseumawe menggunakan analisis regresi linear sederhana, Dari data jumlah Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah, kemudian disusun pasangan

data kedua variabel yaitu Pendapatan Asli Daerah (X) dan Belanja Daerah (Y).

Hasil Olah Data Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap

Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Lhokseumawe dihitung menggunakan software SPSS 16 dan hasilnya disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.4 Hasil Regresi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.073E9	9.237E10		.022	.983
PAD	16.753	3.382	.868	4.953	.001

a. Dependent Variable: Penerimaan Daerah

Berdasarkan hasil pengolahan data seperti terlihat pada Tabel 4.4, maka dituliskan dalam sebuah persamaan regresi dengan model matematis sebagai berikut;

$$Y = 2.073 + 16,753X$$

Berdasarkan hasil pengolahan Data dengan menggunakan model Regresi Linear Sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut.

Konstanta (a) sebesar 2,073, ini menunjukkan bahwa apabila Pendapatan Asli Daerah konstan sebesar 2,073, maka Belanja Daerah juga akan konstan sebesar 2,073.

Selanjutnya koefisien regresi (b) = 16,753. Hal ini menunjukkan jika Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar 1 satuan, maka Belanja Daerah juga terjadi peningkatan sebesar 16,753 satuan. Hasil ini sesuai dengan

penelitian terhadulu yang pernah dilakukan oleh Fitriyani (2013) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh terhadap Belanja Daerah dan selanjutnya Penelitian yang pernah dilakukan Henri Edison H. Pangabean (2009) yang menyatakan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

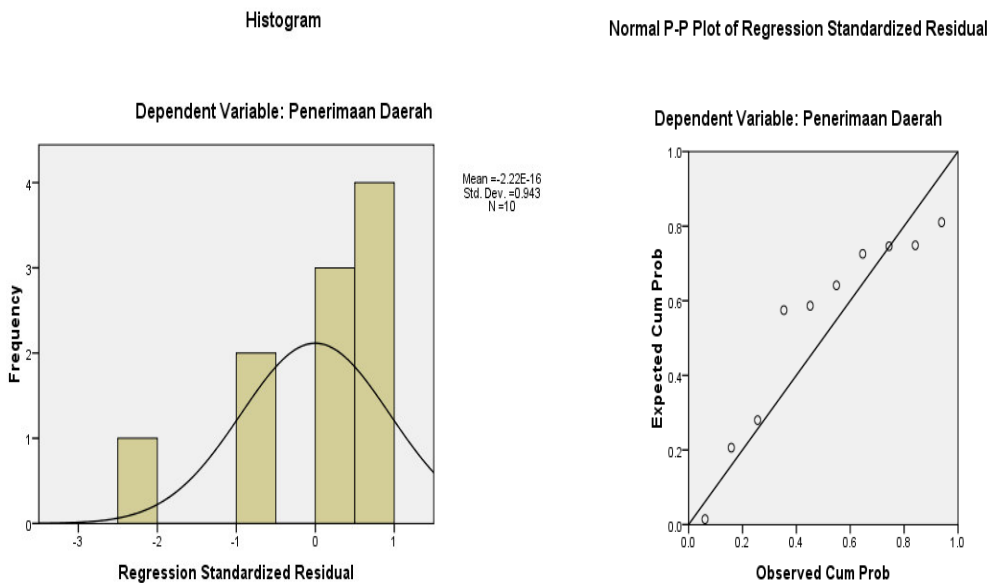
**3. Pengujian Asumsi Regresi**

Sebelum hasil analisis regresi diuji dan dianalisa lebih lanjut, ada beberapa asumsi yang harus diuji guna mengetahui apakah kesimpulan dari regresi tersebut tidak bisa, diantaranya adalah uji normalitas, uji multikolinieritas (untuk regresi linear sederhana), uji heteroskedastisitas dan

uji autokorelasi (untuk data yang berbentuk deret waktu). Pada penelitian ini hanya tiga asumsi yang disebutkan diatas tersebut harus diuji karena variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini hanya satu hingga tidak perlu dilakukan uji multikolinieritas.

Asumsi normalitas merupakan syarat yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan koefisien regresi, apabila model regresi tidak berdistribusi normal maka kesimpulan dari uji t masih diragukan, karena statistik uji t dalam analisis regresi diturunkan dari distribusi normal. Pada penelitian ini digunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas model regresi.

### 1) Hasil Pengujian Asumsi Normalitas



**Gambar 4.1 : Kurva Normalitas**

Pada Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa data sudah berdistribusi normal dilihat dari sebaran data berkisar diantara garis regresi dan sudah membentuk kurva normal.

### 2) Pengujian Asumsi Autokorelasi

Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi antar observasi yang

diukur berdasarkan deret waktu dalam model regresi atau dengan kata lain error dari observasi yang satu dipengaruhi oleh error dari observasi yang sebelumnya. Akibat dari adanya autokorelasi dalam model regresi, koefisien regresi yang diperoleh menjadi tidak efisien, artinya tingkat kesalahannya menjadi sangat besar dan koefisien regresi menjadi tidak stabil.

**Tabel 4.5**  
**Hasil Pengujian Asumsi Autokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.868 <sup>a</sup>	.754	.723	1.10990E11	1.284

a. Predictors: (Constant), PAD

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

Dari hasil pengolahan data pada Tabel 4.5 diperoleh nilai statistik Durbin Watson (D-W) = 1.284, sedangkan dari tabel d pada tingkat kekeliruan 5 % Jumlah variable bebas = 1 dan jumlah pengamatan n = 10 diperoleh batas bawah nilai tabel (dl) = 0,610 dan batas atasnya (du) = 1,40. Karena 1.284 jatuh diantara du (1,40) dan 4-du (2,60), yaitu pada daerah tidak ada autokorelasi maka disimpulkan tidak terdapat autokorelasi pada model persamaan regresi.

Setelah ketiga asumsi regresi terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa hasil estimasi model regresi variable fee based income terhadap laba operasional memenuhi syarat BLUE (*best linear unbiased estimation*) sehingga dapat dilanjutkan pada pengujian hipotesis.

**4. Pengujian Hipotesis**

Selanjutnya untuk menguji apakah Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan Belanja Daerah maka dilakukan pengujian secara statistik dengan hipotesis sebagai berikut:

Ho :  $\beta = 0$  Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Ha :  $\beta \neq 0$  Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Pada Tabel 4.3 diperoleh nilai  $t_{hitung}$  variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 4,953, sementara dari tabel distribusi t pada tingkat signifikan 5% ( $\alpha=0,05$ ) dan derajat bebas  $10-2 = 8$  diperoleh nilai  $t_{tabel}$  untuk pengujian dua arah  $t_{tabel}$  sebesar 2,306. Oleh karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , yaitu  $4,953 > 2,306$ , maka menerima Ha dan menolak Ho. Hal ini juga bisa dilihat pada P-Valeu  $\alpha=5\%$ , yaitu  $0,001 < 0,05$ , jadi Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah.



**5. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) dan Koefisien Korelasi (R)**

Koefisien determinasi dihitung untuk menunjukkan besarnya kontribusi/peranan variabel peningkatan Pendapatan Asli Daerah terhadap

peningkatan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Lhokseumawe. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan program SPSS 16 diperoleh koefisien determinasi sebagai berikut.

**Tabel 4.6**  
**Koefisien Determinasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Peningkatan Belanja Daerah**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.868 <sup>a</sup>	.754	.723	1.10990E11	1.284

a. Predictors: (Constant), PAD

b. Dependent Variable: Penerimaan Daerah

Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) dalam model dapat dilihat dan R-Square yaitu sebesar 0,754 nilai ini menunjukkan hubungan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap peningkatan Belanja Daerah adalah sebesar 0,754 (75,4%), sedangkan yang dipengaruhi oleh variabel lain diluar model ini adalah sebesar 0,246 (24,6%). Sedangkan Koefisien Korelasi (R) adalah sebesar 0,868. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai keeratan hubungan dengan Belanja Daerah, karena nilai 0,868 mendekati positif satu (+1) jadi hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah sangat erat secara positif.

**E. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Lhokseumawe, maka pada bagian akhir dari penelitian ini penulis menarik kesimpulan sekaligus memberikan saran sebagai berikut.

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pengolahan dengan menggunakan model Linear Sederhana dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Lhokseumawe

## Daftar Pustaka

- Abdul, Halim. (2007). Akuntansi Keuangan Daerah Salemba Empat: Jakarta
- Anonimous, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara di Negara Indonesia.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah di Indonesia.
- \_\_\_\_\_, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 Tentang Bagan Akun Standar di Indonesia.
- \_\_\_\_\_, Keputusan Menteri Dalam Negeri. Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di Indonesia.
- Ayu, Kusumadewi, Diah, dan Arief Rahman. (2007). Flaypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia. Jurnal Volume No. 1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Bambang, Prakoso, Kesit, (2004). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Prdiksi Belanja Daerah (Studi Empiris di Wilaya Jaw Tengah dan DIY). Jurnal JAAI VOLUME 8 NO. 2, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Darwanto dan Yustikasari, Yulia. (2007). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar.
- Damodr N. Gujarati, 2003 "Basic Economics" fourth edition McGraw-Hill, New York.
- Hanif, Nurcholis. (2005).Teori Pemerintahan dan Otonomi Daerah. PT. Grasindo: Jakarta.
- Indra, Bastian. (2006). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Erlangga: Jakarta.
- Imam, Ghozali dan John Castellan. (2006). Statistik non-Parametrik: Teori dan Aplikasi dengan Program SPSS. Badan Penerbit UNDIP.

- M, Daniel, (2003), *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah: Buku Seri Membudayakan Akuntabilitas Publik*. Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Penertbit Andi: Yogyakarta.
- Moh. Nasir, (2005). *Metode Penelitian*. Penerbit Ghalia Indonesia: husus (DJakarta).
- Novi, Pratiwi. (2007). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Indonesia*. Skripsi Sarjana (duplikasikan). Fakultas Ekonomi UII: Yogyakarta.
- Nur, Indah Rahmawati. (2010) *Pengaruh Dana Alokasi Khusus ( PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)*. Skripsi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nugroho, Suratno, Putro. (2010). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah)*. Jurnal Ekonomi Universitas Dipenogoro, Semarang.
- Supriady, Brakatuhsumah, Deddy dan Dadang Solihin. (2001). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Sony, Yuwono, dkk. (2008). *Memahami APBD dan Permasalahannya Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah*. Penerbit Bayumedia Publishing: Malang-Jawa Timur.
- Supranto J. 2001, *Statistik Teori dan Aplikasi*, Jilid 2, Edisi Enam, Erlangga. Jakarta.
- Tri, Bawano, Bernanda, Catot. (2008). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah*. Skripsi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Yusdianto, Prabowo. (2006). *Akuntansi Perpajakan Terapan*. PT. Grasindo: Jakarta.